

Judul : Pengaturan impor BBM, buat lindungi devisa, kurangi ketergantungan
Tanggal : Senin, 06 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pengaturan Impor BBM Buat Lindungi Devisa, Kurangi Ketergantungan

ANGGOTA Komisi XII DPR Jalal Abdul Nasir mendorong Pemerintah memperkuat komunikasi publik agar kebijakan strategis sektor energi tidak disalahpahami. Apalagi sampai menimbulkan sentimen negatif terhadap Pemerintah.

Menurutnya, persoalan ini tidak terkait salah atau benar kebijakannya, tapi soal bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan. Pemerintah punya niat baik menjaga ketahanan energi dan devisa, tapi karena kurang tersampaikan dengan baik. Publik menganggap seolah-olah Pemerintah menghambat.

Anggota Fraksi PKS itu menjelaskan, kebijakan pengaturan impor BBM oleh Pemerintah bertujuan menjaga keseimbangan neraca migas. Langkah ini juga dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan impor dan me-

lindungi devisa negara.

"Namun, tanpa penjelasan yang memadai, publik bisa keliru menilai dan menganggap kebijakan tersebut sebagai penyebab kelangkaan di SPBU swasta," ujar Jalal dalam keterangannya, Sabtu (4/10/2025).

Padahal, sambungnya, data menunjukkan kuota impor SPBU swasta tidak dikurangi, bahkan naik dibanding tahun lalu. Kelangkaan justru terjadi karena penjualan meningkat tajam dan kuota tahunan habis lebih cepat. Itu adalah fakta yang penting untuk disampaikan ke publik.

Selain itu, dia juga menyoroti kabar karyawan SPBU swasta yang dirumahkan, padahal secara bisnis mereka sedang meraih keuntungan besar karena lonjakan permintaan. Dari pandangan sejumlah pengamat, tidak



Jalal Abdul Nasir

ada alasan logis SPBU swasta merumahkan pegawainya.

Jika penjualan naik dan laba meningkat, kata dia, seharusnya ada ruang untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan kesejahteraan karyawan. "Jangan sampai pekerja dikorbankan di

tengah cuan perusahaan yang naik," tuturnya.

Legislator asal Dapil Jawa Barat VII itu mendorong Kementerian ESDM dan Badan Komunikasi Pemerintah untuk proaktif menjelaskan kebijakan impor satu pintu. Selain itu juga memastikan bahwa kebijakan tersebut memang menguntungkan rakyat dan negara.

"Komunikasi publik itu kunci. Rakyat harus tahu, Pemerintah bekerja melayani rakyat, bukan kepentingan segelintir pihak. Jelaskan dengan jujur dan terbuka agar tidak muncul kesalahpahaman," imbuhnya.

Dia juga mendorong pentingnya perlindungan terhadap pekerja dan transparansi kebijakan, agar publik memiliki kepercayaan penuh terhadap arah kebijakan energi nasional. "Kalau kita ingin mandiri energi,

harus mulai dengan mendukung produk bangsa sendiri. Pemerintah memperbaiki mutu dan layanan, rakyat pun ikut membangun loyalitas," katanya.

Anggota Komisi XII DPR Yulisman menambahkan, isu kelangkaan BBM di SPBU swasta tidak boleh menimbulkan kegaduhan publik. Pemerintah dinilai telah menjalankan komitmennya menjaga ketahanan energi sekaligus mendorong transisi menuju energi bersih.

Legislator Fraksi Golkar itu menjelaskan, Negara punya kewajiban untuk menjamin ketersediaan BBM dari Aceh sampai Papua, dan hingga saat ini tidak ada masalah. "Pertamina memastikan stok aman dan distribusi berjalan dengan baik. Jadi tidak perlu ada framing yang menyesatkan seolah-olah ada krisis energi," katanya. ■ PVB